



# PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
#melayani  
#bangsa**



<https://pt-jakarta.go.id/>



@pengadilantinggi\_dki\_jakarta



info.ptdkjakarta@mail.com



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

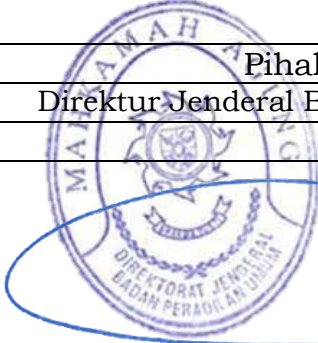



Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. BAMBANG MYANTO, SH., MH.**  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

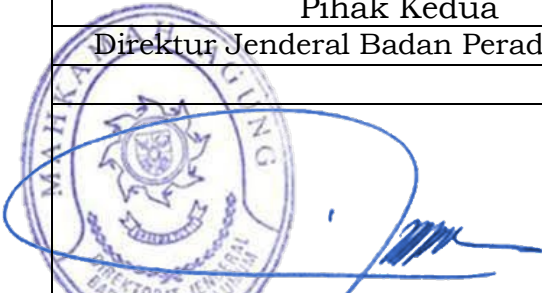

Jakarta, 03 Januari 2023

 Pihak Kedua	 Pihak Pertama
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	
H. BAMBANG MYANTO, SH., MH NIP. 19680523 199212 1 002	DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum NIP. 19560405 198203 1 005

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	95% 95% 95%
		b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	56%
		c.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	75% 92% 95%
3	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	a.	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%
4	Peningkatan kualitas SDM	a.	Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)	70 Org

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 46.931.668.000,- (Empat puluh enam milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.195.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.516.130.000,- (Lima Ratus Enam belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribuh Rupiah)

Jakarta, 03 Januari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
	
H. BAMBANG MYANTO, SH., MH NIP. 19680523 199212 1 002	DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum NIP. 19560405 198203 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H.**  
Jabatan : Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2023



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

**DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Panitera

**H.TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H.**  
NIP. 19641110 198702 1 001



NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET		
1	2		3	4		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	95% 95% 95%		
		b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	56%		
		c.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	75% 92% 95%		
		3	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	a.	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%
		4	Peningkatan kualitas SDM	a.	Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)	70 Org

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.516.130.000,- (Lima Ratus Enam belas Juta Seratus Tiga PULuh Ribu Rupiah)

Jakarta, 03 Januari 2023



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Panitera

H.TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H.  
NIP. 19641110 198702 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDIYANTO, SH.,MH.**  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

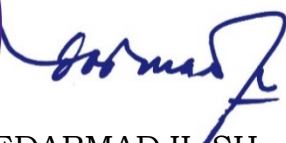
Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Januari 2023



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

  
**DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum**  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Sekretaris

  
**SUDIYANTO, SH.,MH.**  
NIP. 19691130 199203 1 001

NO.	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2		3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	95% 95% 95%
		b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:	56%
		c.	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	75% 92% 95%
3	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	a.	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%
4	Peningkatan kualitas SDM	a.	Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)	70 Org

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 46.931.668.000,-
		(Empat puluh enam milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.195.000.000,-
		(Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

Jakarta, 03 Januari 2023



Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum  
NIP. 19560405 198203 1 005

Pihak Pertama  
Sekretaris

SUDIYANTO, SH.,MH.  
NIP. 19691130 199203 1 001



# LAMPIRAN





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**NOMOR : W10.U/44 /KP.01.1/2/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2023, LKJiP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 DAN RENCANA AKSI 2023) PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

- Membaca** : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
- Menimbang** : a. bahwa Dokumen SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan hasil penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2022, maka perlu penetapan Dokumen SAKIP Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan.

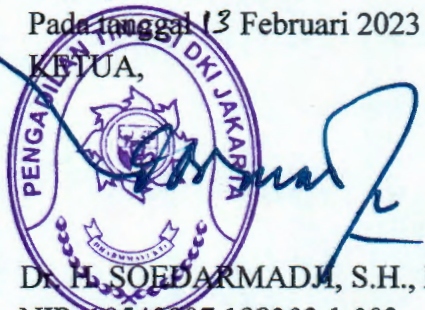
**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (IKU 2023, LKJiP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 DAN RENCANA AKSI 2023) PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Menetapkan Dokumen SAKIP (IKU 2023, LKJiP 2022, PKT 2023, RKT 2023, RKT 2024 dan Rencana Aksi 2023), sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Februari 2023

KETUA,



Dr. H. SOEDARMADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19540807 198303 1 003





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
NOMOR : W10-U/246 /KP.01.1/12/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PKT 2023, RKT 2023 DAN RKT 2024  
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun PKT 2023, RKT 2023 dan RKT 2024 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun PKT 2023, RKT 2023 dan RKT 2024 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  7. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama), ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018



10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2014 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN PKT 2023, RKT 2023 DAN RKT 2024 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun PKT 2023, RKT 2023 dan RKT 2024 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022




Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
NIP. 195604051982031005



**TIM PENYUSUN PKT 2023, RKT 2023 DAN RKT 2024  
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

No.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 19560405 198203 1 005
2.	Penanggung Jawab	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 19611119 198512 1 001
3.	Pengarah Bidang Yudisial	H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H. NIP. 19641110 198702 1 001
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sudiyanto, S.H., M.H NIP. 19691130 199203 1 001
5.	Pelaksana	1. Jul Rizal, SH.,MH NIP. 19610731 198303 1 004 2. Lorentius Raja Sophan Girsang, S.H., M.H NIP. 19620613 198912 1 003 3. Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002 4. Eddy Wiyono, SH. M.H NIP. 19650929 199003 1 001 5. Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003 6. Dwinanto, SE.,SH NIP. 19810525 200904 1 001 7. Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007 8. Indah Pratiwic, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025
6.	Tim Pengolah Data	1. Andral, S.H NIP. 19720309 199303 1 004 2. Gita Yunia Marsya, S.E NIP. 19950620 201903 2 010 3. Dwiningtyas Anggraeni, S.E NIP. 19910616 202012 2 009 4. Suci Wulan Asri, A.Md.Ak NIP. 19970806 202012 2 008 5. Meidina Silmi Putri, S.H NIP. 19980523 202203 2 012 6. Rina Asri Kurniawati, S.H 7. Agus Setiawan, S.S
7.	Sekretariat	1. Itjah Minantika, SE., SH., MH NIP. 19770530 200502 2 001 2. Sabrina Napitupulu, SE, MH NIP. 19661012 200604 2 001 3. Indah Pratiwic, S.E., M.M. NIP. 19880626 201101 2 025 4. Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001

KETUA  
  
 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.  
 NIP. 195604051982031005